

# SYL akan Laporkan Uang Korupsi Kementan Mengalir ke “Green House” Milik Pimpinan Partai

written by Kabar 6 | 5 Juli 2024



Kabar6-Penasihat hukum Menteri Pertanian (Mentan) periode 2019-2023 Syahrul Yasin Limpo (SYL), Djameludin Koedoeboen, menyatakan kliennya berencana melaporkan dugaan aliran uang korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) itu “mengalir” ke pembangunan rumah kaca atau green house milik pimpinan partai.

“Sedang kami diskusikan dengan Pak SYL. Mungkin setelah persidangan pembacaan nota pembelaan (pleidoi) ini akan dipertimbangkan ke arah sana,” kata Koedoeboen kepada wartawan di Jakarta, dilansir Antara Jumat, (5/7/2024).

Maka dari itu dalam persidangan pembacaan pleidoi kali ini,

Koedoeboen menuturkan SYL akan fokus membacakan pembelaan terhadap tuntutan jaksa terkait dengan berbagai fakta persidangan yang mengemuka serta tuntutan yang diberikan jaksa.

**\*\*Baca Juga:** [JPU Tuntut Mati Tiga Pengedar Sabu-sabu](#)

Dengan demikian, kata dia, SYL belum akan mempertajam pembacaan pleidoi ke arah dugaan aliran dana ke rumah kaca di Kepulauan Seribu tersebut.

“Fokus hari ini untuk tuntutan saja. Surat tuntutan dengan banyak 2.000 halaman sekian itu menjadi fokus utama,” ucap dia.

Adapun sidang pembacaan pleidoi dijadwalkan di ruang persidangan utama Hatta Ali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Jumat (5/7/2024) pukul 13.30 WIB, yang akan dipimpin oleh Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh.

Sebelumnya, Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Meyer Simanjuntak mempersilakan kubu SYL melaporkan dugaan aliran dana Kementan ke rumah kaca di Kepulauan Seribu milik pimpinan partai.

“Pada intinya setiap tindak pidana yang dilaporkan akan ditindaklanjuti. Silakan kalau pihak Pak SYL maupun pengacara, penasihat hukumnya mempunyai data informasi yang terkait bahwa ada aset, baik itu yang kami dengar di Kepulauan Seribu, green house dan sebagainya, silakan dilaporkan,” ucap Meyer ditemui setelah sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (28/6).

Meyer mengatakan Indonesia memiliki lembaga penegak hukum yang bisa memproses dugaan tersebut. Hal ini, kata dia, agar asumsi itu tidak menjadi sebatas bola liar tanpa validasi.

“Silakan itu dibuktikan dan dilaporkan saja, supaya tidak menjadi bola panas atau bola liar. Kami menghargai kalau

memang ada info itu, tentu siapa pun ya akan didalami, harus siap untuk mengikuti proses hukum selanjutnya. Kami menunggu,” katanya.

Adapun dalam persidangan pembacaan tuntutan pekan lalu, Koedoeboen secara tiba-tiba menyinggung soal rumah kaca di Kepulauan Seribu milik pimpinan partai tertentu. Ia menduga, ada aliran dana dari Kementan untuk pembangunan rumah kaca itu.

Menurut Koedoeboen, dugaan korupsi di Kementan bukan hanya perihal perkara yang melibatkan SYL yang tengah bergulir di meja hijau. Dia juga ingin jaksa KPK mengusut seseorang bernama Hanan Supangkat.

SYL dituntut pidana penjara 12 tahun dan denda Rp500 juta subsider pidana kurungan 6 bulan. Selain itu, SYL dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp44,27 miliar dan ditambah 30 ribu dolar Amerika Serikat (AS), dikurangi dengan jumlah uang yang telah disita dan dirampas.

Jaksa menuntut agar SYL dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam kasus tersebut, SYL menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementan lantaran diduga melakukan pemerasan atau menerima gratifikasi dengan total Rp44,5 miliar.

Pemerasan dilakukan Mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu bersama Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021–2023 Kasdi Subagyono serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Tahun 2023 Muhammad Hatta, yang juga menjadi terdakwa.(red)

---

# Aliran Dana Korupsi Diduga Mengalir ke Pejabat Dispora Tangsel

written by Redaksi | 5 Juli 2024



Kabar6-Jaksa terus menyelidikan aliran dana hibah APBD 2019 di KONI Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang dikorupsi. Aliran dana diduga juga mengalir ke pejabat dinas pemuda dan olahraga setempat.

“Ya kita dalam, belum ditemukan. Kita cari mana yang menentukan alat bukti,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangsel, Aliansyah kepada kabar6.com usai pemusnahan barang bukti pidana umum di kantornya, Serpong, Kamis (17/6/2021).

Menurutnya, ketua beserta bendahara KONI Tangsel bertanggungjawab. Keterangan dua tersangka dan para saksi pun hingga kini masih berkembang.

“Ini kita masih bekerja periksa saksi-saksi. Mudah-mudahan menemukan bukti itu,” terang Aliansyah.

Kalau nanti alat bukti terpenuhi berkas-berkas lengkap, lanjutnya, segerakan dilimpahkan pengiriman tersangka dan barang bukti tahap dua. Proses hukum saat ini masih masih penyidikan.

“Kalau nanti lengkap P21. Kalau nanti belum lengkap tentu akan kita perpanjang 40 hari,” jelasnya.

\*\*Baca juga: [Sinar Mas Land Berikan Bantuan Pendidikan kepada 785 Pelajar dan Pendidik](#)

Terpisah, mantan Kabid Peningkatan Prestasi dan Olahraga Dispora Tangsel, Ucok A.H Siagian mengaku dirinya tidak mengetahui persis soal aliran dana hibah senilai Rp 7,8 miliar hingga merugikan keuangan negara sebanyak Rp 1,1 miliar.

“Demi ALLAH,” singkat Ucok lewat pesan singkat. Hingga berita ini diturunkan Kepala Dispora Kota Tangsel Entol Wiwi Martawijaya tidak dapat dikonfirmasi.(yud)